



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 21 April 2025

Halaman: 4

TAJUK

IPM Kota Jogja Tertinggi Nasional Jadi Modal Turunkan Ketimpangan Pendapatan

Kota Jogja lagi-lagi meraih nilai indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi nasional pada 2024. Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemkot Jogja 2024 tercatat IPM di Kota Jogja mencapai 89,1%.

Dilihat dari angka tersebut, IPM Kota Jogja naik 0,55% jika dibandingkan 2023 yang saat itu mencapai 88,61%. Selain IPM, dalam LPPD itu juga terdapat indikator kinerja pemerintah daerah lainnya yang dinilai. Meliputi angka kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, hingga ketimpangan pendapatan atau gini ratio.

Prestasi ini tentu perlu diapresiasi. Meski demikian kita

tak boleh terlena. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menuturkan capaian ini justru harus ditingkatkan. Apalagi tantangan ke depan semakin berat. Pasalnya IPM ataupun Human Development Index (HDI) di tahun ini akan bergeser menjadi Human Capital Index (HCI) atau Indeks Modal Manusia, dengan fokus yang lebih luas pada modal manusia dan potensi sumber daya manusia (SDM).

Tantangan selanjutnya yang perlu segera diatasi adalah ketimpangan pendapatan atau gini ratio di Kota Jogja yang tercatat berada pada angka 0,449% di tahun 2024. Sebenarnya, angka ketimpangan pendapatan Kota Jogja pada 2024 menurun dibandingkan 2023. Namun selisih

penurunan tersebut masih tipis, sekitar 1,101%.

IPM tertinggi secara nasional seharusnya tak hanya dimaknai sebagai prestasi yang membanggakan. Namun seharusnya diterima secara luas demi tujuan mengembalikan pencapaian tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian capaian IPM tertinggi untuk dapat menjadi modal untuk menurunkan gap tersebut.

Pemkot Jogja memiliki sejumlah rencana untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Salah satunya dengan merealisasikan program Pemerintah Pusat untuk mendorong ekonomi kerakyatan di Kota Jogja. Salah satunya melalui koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang.

Manfaat koperasi sebenarnya sudah banyak dirasakan banyak pihak selama puluhan tahun Indonesia merdeka. Sayangnya, perkembangan koperasi di Indonesia seakan tertutup bayang-bayang perbankan, lembaga pembiayaan hingga pinjaman online. Dengan demikian, jika Pemkot konsisten dengan gerakan ini, inovasi ekonomi kerakyatan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip koperasi.

Pemkot Jogja juga perlu menginisiasi program lain yang mempercepat penurunan ketimpangan pendapatan tersebut. Misalnya dengan mendorong keterampilan SDM sesuai kebutuhan zaman

agar mampu bersaing secara nasional, bahkan global. Untuk itu, pembangunan SDM kita perlu diperluas. Termasuk dengan menguatkan jaringan infrastruktur teknologi agar penguasaan teknologi SDM Kota Jogja lebih unggul dibanding kota lain.

Selanjutnya, Pemkot Jogja juga perlu menggandeng *civitas academica* setempat dan pihak lain untuk mengatasi masalah-masalah lain. Dengan banyaknya pihak yang digandeng dan dari berbagai latar belakang, akan ada banyak pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal kita. Dengan harapan citra Kota Berhati Nyaman benar-benar dirasakan seluruh warga Jogja, bukan sekadar slogan tanpa arti.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005